

Hari/Tanggal : Senin, 25 Januari 2021
Waktu : 13.00 WITA-selesai
Tempat : Rumah

KORPS SCHUTTERIJ DI MAKASSAR TAHUN 1875-1917



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Hasanuddin**

Oleh:

SRI SELVI RAHMAYANTI

F81116306

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

Hari/Tanggal : Senin, 25 Januari 2021
Waktu : 13.00 WITA-selesai
Tempat : Rumah

KORPS SCHUTTERIJ DI MAKASSAR TAHUN 1875-1917



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Hasanuddin**

Oleh:

SRI SELVI RAHMAYANTI

F81116306

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

SKRIPSI

KORPS SCHUTTERIJ DI MAKASSAR TAHUN 1875-1917

Disusun dan diajukan oleh:

SRI SELVI RAHMAYANTI

F811 16 306

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.
NIP. 19741016 200312 3 001

Drs. Ding Pradadimara, M.A., M.S.
NIP. 19641217 199803 1 001

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010

Dr. Nahdia Nur, M.Hum.
NIP. 19650321 199803 2 001

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

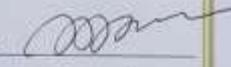
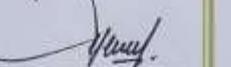
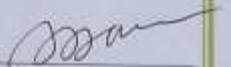
Pada hari Senin, 25 Januari 2021, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

KORPS SCHUTTERIJ DI MAKASSAR TAHUN 1875-1917

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



Makassar, 25 Januari 2021

1. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A. Ketua : 
2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. Sekretaris : 
3. Dr. Ilham, S.S., M. Hum. Penguji I : 
4. Nasihin, MA. Penguji II : 
5. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A. Konsultan I : 
6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. Konsultan II : 

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Selvi Rahmayanti

NIM : F811 16306

Departemen : Ilmu Sejarah/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

KORPS SCHUTTERIJ DI MAKASSAR TAHUN 1875-1917

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70).



Makassar, 25 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,


Sri Selvi Rahmayanti
F811 16 306



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam dan shalawat tak lupa juga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penulisan skripsi yang berjudul “**Korps Schutterij di Makassar tahun 1875-1917**” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang dialami, namun berkat kegigihan dan keteguhan dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini menguras banyak waktu dan tenaga, tetapi berkat dukungan dari orang-orang terdekat, beban yang dirasakan penulis menjadi lebih ringan dan dapat dilalui. Kepada kedua orangtua penulis yang telah memberikan segala dukungan dan upaya agar penulis dapat melalui semua kesulitan yang dihadapi terima kasih telah selalu mendukung apapun keputusan penulis dan selalu percaya dengan langkah yang penulis ambil. Berkat doa, kasih sayang, cinta dan perhatian yang selalu diberikan selama ini penulis dapat tumbuh seperti saat ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi doa dan kepercayaan kepada penulis.

Ungkapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada orang-orang

terdekat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A selaku dosen pembimbing I dan bapak Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, berkat keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A. selaku penasehat akademik penulis yang telah membimbing penulis selama hampir 4 tahun penulis menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah. Terima kasih telah menjadi penasehat akademik yang luar biasa bagi penulis. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya.
3. Dr. Ilham, S.S., M. Hum., selaku penasehat akademik penulis selama proses pemilihan judul dan penulisan skripsi. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala nasehat yang diberikan kepada penulis.
4. Dr. Nahdia Nur, M. Hum., selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. Ag., selaku sekretaris departemen. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dosen pengajar di Departemen Ilmu Sejarah atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepda penulis selama menempuh pendidikan di Departemen

Ilmu Sejarah, yakni; Dr. Bambang Sulistyو Edi Purwanto, M.S., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lep., M.Hum., Nasihin M.A., Dr Muslimin AR Effendy, M.A., Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si., dan A. Lili Evita, S.S., M.Hum. Terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada mendiang Margriet Mokka Lappia, S.S., M.S., yang telah memberikan banyak nasihat kepada penulis selama masa pendidikan. Ilmu dan nasehat yang diberikan akan terus penulis ingat, semoga beliau tenang di peristirahatan terakhirnya. *Aamin*. Serta Uddjie Usman Pati S. Sos., selaku kepala kesekretariatan Departemen Ilmu Sejarah.

5. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, terkhusus staf yang telah membantu segala jenis pengurusan berkas penulis sehingga dapat sampai pada tahap ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Departemen Ilmu Sejarah angkatan 2016 “Historian16” yang telah menemani penulis selama 4 tahun berproses bersama hingga mencapai tahap ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman atas persahabatan dan kenangan berharga yang telah diberikan. Kepada: Pitto, Eve, Ega Kiki, Siska, Intan Dwbp, Tati, Ical, Jusni, Arafah, Erni, Erwin S, Erwin Gutawa, Ben, Nisa, Isman, Rahmadi, Arul, Hendra, Alle, Burhan, Ammar, Akang, Rais dan Alam.
7. Untuk Dian Permana Putri, Hardewi, dan Sinar Rahmania sahabat yang 404 Akhlaq not found terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan semangat yang diberikan. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan semangat yang sama dalam menggapai cita-cita masing-masing. Untuk

dayen semoga segera jadi sultan, untuk Dewi semoga Moza tetap sehat dan panjang umur, untuk sinar semoga segala urusannya dilancarkan.

8. Komunitas Lingkar yang telah memberikan pengalaman dan ilmu mengenai event kesejarahan dan dampak positif selama masa perkuliahan penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan. kepada Kak Anna, Kak Kahfi, Kak Teguh, Kak Anto, Kak Alif, Kak Ruth dan Salsa.
9. Teman-teman KKN 102 Posko Bulutana terima kasih atas persahabatan dan keseruan yang diciptakan bersama selama berKKN meskipun singkat, persahabatan yang terbentuk benar-benar menjadi bagian penting dalam kenangan penulis, kepada: Amal. Sophia, Mawa, Kadet, Wilfah/Willy, Fauzan, Sabri, Bismi, Sis Anto, Irfan dan Asyraf.
10. Kepada sahabat seperjuangan yang selalu jadi support system dalam mengerjakan skripsi. Yang tidak pernah bosan membantu segala keperluan penulis, terima kasih penulis ucapkan kepada Ade, Rina, Pute, Ayu, Ica, Ida, dan Uni.
11. Teman-teman XII AK I yang selalu memberikan dukungan kepada penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya
12. Untuk Treasure dan Teume yang menjadi sumber semangat bagi penulis terutama untuk member Treasure Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Jaehyuk, Mashiho, Asahi, Yedam, Doyoung, Haruto, Jeongwoo, dan dedek Junghwan. Terima kasih sebesar-besarnya karena selalu menemani penulis terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Untuk idol lain yang tidak kalah penting, terima kasih penulis ucapkan atas

semangat yang diberikan.

13. Spendubi yang tidak pernah berubah bobroknnya terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis. Untuk Mita, Gate, Cindy, Nisa, Laksmi, Amin, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan.
14. Untuk Kakakku yang selalu menjadi tempat kedua berkeluh kesah terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat terutama dukungan materilnya saya kira itulah gunanya kakak, dan untuk adikku terima kasih atas semangat yang diberikan selama ini.

Makassar

11 Januari 2021

Penulis.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENERIMAAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR ISTILAH.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XV
ABSTRACT.....	XVI
ABSTRAK.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4.1 Tujuan Penulisan.....	7
1.4.2 Manfaat Penulisan.....	7
1.5 Metodologi Penelitian	7
1.6 Tinjauan pustaka	9

1.7 Sistematika Penulisan.....	15
2.1 Gambaran Wilayah Kota Makassar	18
2.2 Kondisi Sosial Penduduk Kota Makassar	26
2.3 Struktur Pemerintahan di Kota Makassar di Abad ke XIX	33
2.4 Pengelolaan Keamanan Kota Makassar	38
BAB III KORPS <i>SCHUTTERIJ</i> DI HINDIA BELANDA.....	45
3.1 Korps <i>Schutterij</i> di Belanda.....	45
3.2 Korps <i>Schutterij</i> di Hindia Belanda.....	53
3.2.1 Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Pada Pasukan <i>Schutterij</i>	55
3.2.2 Keanggotaan <i>Schutterij</i> di Hindia Belanda.....	63
3.2.3 Korps <i>Schutterij</i> di Pulau Jawa	70
3.2.4 Korps <i>Schutterij</i> di Luar Pulau Jawa	75
3.3 Satuan Bersenjata Lain yang tidak termasuk bagian dari KNIL di Hindia Belanda.....	78
3.3.1 Djayangsekar dan Pradjoeit.....	78
3.3.2 Barisan di Madura.....	79
3.3.3 Lijfwachten Dragonders.....	80
3.3.4 Korps Polisi Besenjata (Korpsen Gewapende Politiedienaren).....	81
3.3.5 Korps Sukarelawan (<i>Vrijwillingerkorpsen</i>)	82
3.3.6 Legioen van Mangkoe Negoro	83
BAB IV KORP <i>SCHUTTERIJ</i> DI KOTA MAKASSAR.....	85

4.1 Pengelolaan Satuan Pengawal Kota.....	85
4.1.1 Perekrutan Pesonel.....	89
4.1.2 Jumlah Personel, Kekuatan (Formatie, Wapening, Kleeding, Toelagen en Administratie).....	92
4.1.3 Pembayaran Kontribusi dan Tunjangan Personel	93
4.2 Personel Pengawal Keamanan Kota Makassar	97
4.3 Latar Belakang Personel Pasukan Pengawal Kota	101
BAB V PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Map Fort Rotterdam and Environs, 17th Century.
- Gambar 2.2 : Aktivitas Penduduk Kota di Pinggir Pantai sekitar tahun 1910
- Gambar 2.3 : Lingkungan Kantor Gubernur dan Sekolah Tingkat Pertama Makassar
- Gambar 2.4 : Kantor Gubernur Celebes
- Gambar 2.5 : *Inheemse Bestuurders en Bestuursambtenaren, Vermoedelijk te Makassar*
“Pengawai Negeri dan Pengurus Adat –mungkin di Makassar”
- Gambar 3.1 : Potret pasukan pengawal kota di Belanda
- Gambar 3.2 : Lukisan Seragam Pasukan Pengawal Kota
- Gambar 3.3 : Korps *Schutterij* dan pasukan lokal sultan Ternate
- Gambar 3.4 : Korps *Schutterij* di Batavia sekitar tahun 1880
- Gambar 4.1 : *Burgerwachtstraat* te Makassar
- Gambar 4.3 : *De Hospitaalweg* te Makassar.

DAFTAR ISTILAH

No	NAMA/ISTILAH	KETERANGAN
1	<i>Beeldenstorm</i>	Ikonoklasma
2	<i>Brandspuitmeester</i>	Kepala urusan penyemprotan
3	<i>Buitenbezittengen</i>	Wilayah luar Jawa
4	<i>Chirurgij-Majoor</i>	Mayor ahli bedah
5	<i>Deurwaarder</i>	Jurusita
6	<i>Dragonders</i>	Pasukan Kavaleri Bersenjata Ringan
7	<i>Dutch Reformed Church</i>	Gereja Reformasi Belanda
8	<i>Een Adjudant Onderofficier</i>	Ajudan perwira pertama
9	<i>Eene Ritmeester</i>	Musisi
10	<i>Eerste Luitenant</i>	Letnan Tingkat Satu
11	<i>Europesche Wijkmeester</i>	Kepala pemukiman Eropa
12	<i>Gewest</i>	Wilayah
13	<i>Griffier</i>	Panitera
14	<i>Hoofdpriester</i>	Imam
15	<i>Howitzer</i>	Jenis senjata artileri yang digunakan untuk serangan darat
16	<i>Kanonniër of Konstapel</i>	Prajurit
17	<i>Kanonier</i>	Jenis senjata yang banyak digunakan oleh pasukan infanteri Hindia Belanda
18	<i>Kapiten Kwartiermeester</i>	Kapten intendan
19	<i>Karabijn</i>	Senjata Api yang daya tembaknya tidak sebesar senjata laras panjang
20	<i>Krijgsraad</i>	Pengadilan militer
21	<i>Landelijke Schutter</i>	Perwira pengawal kota
22	<i>Landraad</i>	Pengadilan perdata dan pidana untuk masyarakat Pribumi dan perdata untuk orang Eropa
23	<i>Luitenant der Schutters</i>	Letnan penembak
24	<i>Luitenant-Kolonel</i>	Letnan kolonel
25	<i>Majoor der schutters</i>	Mayor penembak
26	<i>Medicinae Doctor</i>	Dokter militer
27	<i>Mobile Verklaring</i>	Bergerak menggunakan kendaraan
28	<i>Paggers</i>	Tembok dari batang kelapa atau bambu yang pertama kali didirikan tahun 1765
29	<i>Raad van justitie</i>	Dewan Kehakiman
30	<i>Regeringreglement</i>	Peraturan pemerintah
31	<i>Schutterij</i>	Satuan pengawal kota

32	<i>Schutter raden</i>	Dewan pengawal
33	<i>Schutters Kapiten</i>	Kapten penembak
34	<i>Schutters Vaandrig</i>	Calon opsir cadangan
35	<i>Schutters Korporaal</i>	Kopral penembak
36	<i>Schuttergilden</i>	Nama awal satuan pengawal kota sebelum menjadi <i>Schutterij</i>
37	<i>Secretaris bij den Krijgsraad</i>	Sekretaris di pengadilan militer
38	<i>Sergeant der Schutters</i>	Sersan penembak
39	<i>Sergeant Majoor der Schutters</i>	Sersan mayor penembak
40	<i>Stedelijke Schutter</i>	Petugas kota
41	<i>Tamboer der Schutters</i>	Pemukul tambur
42	<i>Tweede Luitenant-Adjudant</i>	Letnan Ajudan Tingkat Dua
43	<i>Varder Plaatselijk Personeel</i>	Bidang lain-lain
44	<i>Vrijwillingerkorpsen</i>	Korps sukarelawan
45	<i>Wees en Budelkamer</i>	Urusan yatim piatu dan warisan atau juga sering disebut Balai Harta Peninggalan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Keanggotaan Pengadilan Tinggi di Makassar.

Tabel 1.2 : Keanggotaan Pengadilan Negeri di Makassar.

Tabel 3.1 : Formasi satuan *Schutterij* di Batavia

Tabel 3.2 : Jumlah Pasukan Pengawal Kota di Jawa tahun 1873-1875

Tabel 3.3 : Jumlah pasukan pengawal kota di luar pulau jawa tahun 1873-1877.

Tabel 3.3 : Jumlah pasukan pengawal kota di luar pulau jawa tahun 1873-1877.

Tabel 4.1 : Jumlah anggota satuan pengawal kota di Makassar antara tahun 1873-1877

Tabel 4.2 : Biaya Kontribusi *Schutterij* 1879

ABSTRACT

Sri Selvi Rahmayanti, (F81116306), Title “Corps Schutterij in Makassar 1875-1917” under the guidance of Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A, and Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S.

This study aims to provide an overview of the city guard unit (Korps *Schutterij*) in Makassar. The city guard unit is a unit formed by the Dutch East Indies government in several regional cities under resident administration. A city guard unit is a unit consisting of civilians living in the city area and following training according to the Dutch East Indies military standard. In the city of Makassar the city guard unit has existed since 1848, however the regulations governing city guard units in Makassar were only enacted in the *Staatsblad* in 1875. Furthermore, the research will discuss the membership of the *Schutterij* corps in Makassar, the existence of a city guard unit in Makassar is evidence of its importance. maintain a conducive atmosphere of the city. Even so, the Makassar city government itself has established policies that can keep the city area conducive. Members in the *Schutterij* corps are a part that will be discussed further because the members have various work backgrounds.

The research discussion is based on data in the form of personnel allowances, personnel recruitment, contribution cash payments, and the number of *Schutterij* members. The data were obtained from colonial archives such as regering almanacs and newspapers published in the period under study.

Keywords: Makassar, Personnel, Unit, *Schutterij*.

ABSTRAK

Sri Selvi Rahmayanti. (F81116306), dengan judul “Korps Schutterij di Makassar Tahun 1875-1917” yang dibimbing oleh Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A, dan Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai satuan pengawal kota (Korps *Schutterij*) di Makassar. Satuan pengawal kota merupakan satuan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda di beberapa kota regional dibawah pemerintahan residen. Satuan pengawal kota adalah satuan yang beranggotakan masyarakat sipil yang tinggal di wilayah kota dan mengikuti pelatihan sesuai dengan standar militer Hindia Belanda. Di kota Makassar satuan pengawal kota sudah ada sejak 1848, Akan tetapi peraturan yang mengatur mengenai satuan pengawal kota di Makassar baru ditetapkan dalam *Staatsblad* tahun 1875. Lebih jauh, penelitian akan membahas keanggotaan korps *Schutterij* di Makassar, keberadaan satuan pengawal kota di Makassar merupakan bukti pentingnya menjaga suasana kondusif kota. Meskipun demikian pemerintah kota Makassar sendiri telah menetapkan kebijakan yang bisa menjaga agar wilayah kota tetap kondusif. Anggota dalam korps *Schutterij* merupakan bagian yang akan dibahas lebih lanjut karena para anggota memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam.

Pembahasan penelitian berdasarkan pada data-data yang berupa tunjangan personel, perekrutan personel, pembayaran kas kontribusi, dan jumlah anggota *Schutterij*. Data tersebut diperoleh dari arsip kolonial seperti *Regering Almanak* dan surat kabar yang terbit pada periode yang diteliti.

Kata Kunci : Makassar, Personel, Satuan, *Schutterij*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam berbagai kajian sejarah perkotaan belakangan ini, kota hanya didefinisikan sebagai suatu lokasi dalam proses kajian dan penulisan sejarah. Jika dalam kota terdiri dari penduduk kota, warga kota¹ dan aktivitas kota maka dengan memperhatikan luasnya bidang garapan tersebut mestinya akan beragam tema dan pendekatan yang lahir dalam melihat dan menulis tentang sejarah kota.² Wilayah perkotaan di Nusantara memiliki banyak aspek yang dapat diteliti oleh sejarawan terlepas dari kota mana dan bagaimana kota tersebut lahir.

Di wilayah Nusantara lahir dan berkembang kota tradisional seperti Pasai, Aceh, Banten, Jepara, Gresik dan Makassar meskipun akhirnya beberapa kota ini berangsur kehilangan peran dalam perdagangan karena perdagangan jarak jauh berpindah ke kota bandar seperti Melaka. Kota seperti Banten, Batavia, Gresik, Makassar dan Ternate terletak menghadap laut atau sungai besar.³ Kota Makassar yang menurut Reid awalnya berpusat di Somba Opu kemudian berpindah ke Benteng Rotterdam tetap menjaga eksistensinya dalam perdagangan. Pertumbuhan kota Makassar terus terjadi hingga masa pemerintahan Hindia Belanda.

¹ Dias Pradadimara, "Penduduk Kota, Warga Kota, Sejarah Kota : Kisah Makassar", Dalam *Kota lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. pp 252-72. (Yogyakarta: Ombak) .

² Ilham Daeng Makkelo. "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis". *Jurnal Lensa Budaya*. Vol. 12 No. 2 Hal. 84.

³ Anthony Reid. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 jilid 2 Jaringan Perdagangan Global*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) Hal. 3.

Tahun 1677 VOC mengizinkan bangsawan kesultanan Gowa untuk membangun pemukiman di selatan Benteng Rotterdam, di wilayah ini kemudian tinggal kelompok Indo yang berdarah campuran dengan Pribumi (peranakan atau *mestizo*⁴), Pribumi yang beragama kristen dan golongan merdeka. Di wilayah ini pada perkembangannya dibangun kantor pemerintah, pengadilan, tangsi militer, rumah sakit, dan pemukiman pegawai. Di sebelah utara benteng terdapat Negory *Vlaardingen* yang dijadikan pusat perdagangan, di sebelah timur *Vlaardingen* dikenal dengan sebutan Kampung Wajo. Sementara jumlah orang cina terus bertambah dan tidak ada lagi lahan di *Vlaardingen*, mereka diizinkan membangun permukiman di utara Kampung Wajo dan disebut Kampung Cina.⁵

Pada periode pemerintahan Hindia Belanda terjadi beberapa kali perubahan struktur pemerintahan, perubahan ini diiringi dengan perubahan kebijakan penataan kota. Penataan wilayah kota di Sulawesi Selatan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kota di Pulau Jawa. Abad ke-19 dapat dianggap sebagai abad lahirnya kota kolonial meskipun beberapa kota telah berkembang pada periode sebelumnya.

Di Sulawesi sendiri pada tahun 1824 dibentuk *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden* (Pemerintahan Sulawesi dan Wilayah Taklukannya) dan

⁴ Pengelompokan masyarakat menurut kategori-kategori tertentu, meski untuk keperluan kajian akademis, tidaklah pernah sederhana ataupun stabil (dalam arti tidak pernah berubah untuk waktu yang lama). Selain kategori yang dipakai selalu berubah, konteks sosial dan historis dimana (dan oleh siapa) pengelompokan dilakukan juga berubah sesuai dengan arus perkembangan yang terjadi. Dengan berjalannya waktu, muncul kelompok masyarakat “baru” yang lahir dari hubungan antara orang Spanyol dengan indio jauh lebih banyak lagi, antara orang Cina dengan indio yang semuanya diacu sebagai *mestizo* (Anderson 2003, Reed *mestizo* 1978 35, 82). Karena relatif sedikitnya *mestizo* Spanyol, tiap kali istilah dipakai *mestizo* biasanya digunakan untuk mengacu pada Cina. Selengkapanya dalam Dias Pradadimara. “Pembentukan Masyarakat Kolonial di Kepulauan Filipina Hingga Akhir Abad ke-19”.

⁵ Edward L Poelinggomang. *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia) Hal. 147.

Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan berstatus *distrik*, berdasarkan *staatsblad* 1824 No. 31a.⁶ Tahun 1870 *distrik* Makassar berubah statusnya menjadi *afdeling* Makassar, selanjutnya tahun 1903 berdasarkan *Desentralisatiewet* Makassar menjadi bagian dari 32 kota di Hindia Belanda yang mendapat status sebagai *Gemeentelijk Resort* sekaligus menjadi *Gemeente* yang memiliki *Gemeenteraad*.

Seiring dengan penataan administratif, dilakukan pula penataan di berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, badan peradilan, urusan yatim-piatu dan warisan, kepala pemukiman orang Eropa, kepala/urusan penyemprotan, dan urusan keamanan⁷. Dalam mengawasi keamanan di beberapa kota penting pada periode Hindia Belanda, pemerintah saat itu membentuk satuan yang secara khusus ditugaskan diwilayah perkotaan yakni *Schutterij*. Selain itu terdapat beberapa satuan dalam bidang keamanan yang tidak termasuk ke dalam kategori militer maupun kepolisian, satuan tersebut terbagi baik dalam lembaga formal maupun informal, adapun satuan tersebut terdiri dari satuan *Pradjoerit*, *Barisan*, dan *Djayangsekar*

Sejak abad ke 17 di kawasan perkotaan dapat ditemukan pengawal kota (*Schutterijen*), yang merupakan korps pengawal kota yang terdiri dari warga Eropa dan warga bumiputera kristen.⁸ Pasukan pengawal ini diberi tugas untuk mengawal dan mengawasi gudang-gudang pemerintah, kantor pemerintahan dan mengawal transportasi. *Schutterij* (pengawal kota, penjaga sipil, pengawas kota,

⁶ Daud Limbagau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20", Dalam Mukhlis: *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin) Hal. 22.

⁷ *Ibid.*, Hal. 25

⁸ Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: dari Kepedulian dan Ketakutan*, (Kompas & KITLV Jakarta : Jakarta) Hal. 16.

pengawal publik, milisi sipil) dalam terjemahan bahasa inggris berarti *town guards*⁹. Terdapat banyak padanan kata dari *Schutterij* tetapi dalam penulisan ini saya akan menggunakan istilah pengawal kota sebagai kata ganti *Schutterij*.

Dalam *plakaatboek*¹⁰ yang dikeluarkan tanggal 18 Agustus 1620 halaman 70-71, *Schutterij* pertama kali didirikan di Batavia¹¹. Keanggotaan pengawal ini, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah bahwa semua orang Eropa (baik warga negara Belanda maupun penduduk Hindia Belanda) terdiri dari pria yang memiliki fisik baik dan kuat yang telah mencapai usia 18 tahun. Mereka diwajibkan menyerahkan pernyataan tertulis yang memuat identitas diri mereka, niat, pekerjaan ke pengadilan terkait. Kemudian oleh satuan *Schutterij* akan di pilih orang-orang yang harus mengikuti pelatihan. Jika terdapat pelanggaran atau sejenisnya maka yang bersangkutan akan dikenakan denda dari sepuluh hingga seratus *gulden*.¹²

Pengawal kota ini awalnya dibentuk dengan tujuan memastikan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat wilayah perkotaan, meredam kekacauan, kerusuhan dan permusuhan, maka dianggap perlu adanya perusahaan yang memberikan pengawalan dan pengawasan (Termuat dalam *Reglement voor de*

⁹ R.Z. Leirissa, *The Bugis-Makassarese in the Port Towns Ambon and Ternate Through the Nineteenth Century*, (KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies & JSTOR : Leiden) Hal 621 (<http://www.jstor.org/stable/27865655>)

¹⁰ 'Plakat' mengacu ke terminologi plakat kearsipan Belanda- 'suatu peraturan yang ditujukan untuk publikasi umum dengan segel bermaterai, 'plakat'. Istilah 'Hukum' memiliki beberapa makna selama '*Acien Regime*' di Eropa atau era VOC (1609-1799). Dalam bahasa tuturan abad 18, hokum berarti keputusan-keputusan yang sudah dirumuskan yang ditujukan untuk masyarakat umum, dipublikasikan dalam bentuk di tempat-tempat umum kota.

¹¹ Anonim. "Schutterijen", Dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, 2.s (Leiden: N.V. h/h E.J. Brill. Den Haag: Martinus Nijhoff) Hal. 727

¹² Regering Almanak 1922. "*Schutteijen en Andere Korpsen Niet Reehstreeks tot het Leger Behoorende*".

Schutterij te Batavia). Hal yang menarik dari satuan ini adalah meskipun berada dibawah kendali residen dan beranggotakan warga sipil namun secara persenjataan satuan ini dapat dikatakan seimbang dengan satu bataliyon pasukan KNIL. Hal itu dapat dilihat dari persenjataan, pelatihan dan keorganisasian dinas yang dimiliki satuan ini mirip dengan tentara KNIL. Contoh yang dapat kita lihat seperti senjata perseorangan karabijn hingga macam kanoners dalam berbagai ukuran sesuai standar militer.

Sebagaimana ditegaskan oleh kementerian dalam negeri (*Departemen van Binnelandsch Bestuur*) van Dedem (1891-1894) pada 1892, bahwa pemerintahlah yang berkewajiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Meski begitu dalam tulisan ini akan membahas mengenai *Schutterij* yang terdiri dari warga Eropa di Makassar sebagai ibukota *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden* pengawal ini mendapatkan pelatihan, pangkat serta gaji yang sama dengan unit militer lain. Korps *Schutterij* sendiri dikelola oleh karesidenan dimana mereka dibentuk, dan jika dibutuhkan sewaktu-waktu dapat digerakan sesuai izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membantu KNIL dalam tugas peperangan maupun penjagaan.

Keberadaan satuan pengawal kota di beberapa kota di Hindia Belanda merupakan hal menarik untuk dikaji lebih dalam karena berbeda dengan namanya sebagai satuan pengawal kota, anggota dari satuan ini lebih sedikit melakukan pengamanan. Anggota satuan ini menjadikan pekerjaan sebagai setuan pengawal kota sebagai pekerjaan cadangan dari pekerjaan utama mereka. Hal inilah yang ingin di teliti lebih jauh dalam penulisan ini. .

1.2 Batasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis, menentukan batasan masalah penting agar tulisan dapat fokus pada objek yang akan dikaji, batasan-batasan yang dimaksudkan ialah batas temporal dan batasan spasial.

Batasan temporal dalam penulisan karya tulis ini adalah periode tahun (1875-1917). Tahun 1875 dipilih undang-undang pemerintah Hindia Belanda mengenai satuan *Schutterij* di Makassar ditetapkan pada tahun 1875. Tahun 1917 dipilih sebagai tahun terakhir penelitian karena setelah tahun ini tidak ada lagi aturan yang mengatur mengenai *Schutterij* selain itu pergolakan perang dunia pertama juga menjadi faktor penulis memilih tahun 1917 sebagai akhir penelitian.

Dalam batasan spasial penulisan karya ini mengambil batasan untuk wilayah Makassar khususnya mengenai kantor-kantor pemerintahan yang dikawal oleh *Schutterij* serta beberapa wilayah yang berhubungan dengan kota Makassar dan *Schutterij*. Kota Makassar disini dimaksudkan adalah kota Makassar yang lahir setelah VOC menaklukan kesultanan Gowa dan menjadikan benteng ujung pandang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

- 1.3.1. Apa dan bagaimana perkembangan *Schutterij* di Hindia Belanda.
- 1.3.2. Bagaimana Pengorganisasian *Schutterij* di Makassar dan siapa saja Petugas *Schutterij* serta apa saja latar belakang Petugas *Schutterij*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

- a. Menjelaskan mengenai perkembangan *Schutterij* di Hindia Belanda.
- b. Menjelaskan Bagaimana Pengorganisasian *Schutterij* di Makassar dan siapa saja Petugas *Schutterij* serta apa saja latar belakang Petugas *Schutterij*.

1.4.2 Manfaat Penulisan

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang aspek keamanan di kota Makassar pada pertengahan-akhir abad ke 19.
- b. Sebagai referensi bagi kaum yang bergelut di dunia keamanan, pengawalan dan militer dalam memahami tentang pertahanan keamanan pada paruh keempat-akhir abad ke 19 dan juga sebagai referensi bagi penulis berikutnya.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam memaparkan tema yang akan dibahas, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan analisis deskriptif analitis dan menggunakan sistem penulisan yang mengacu pada metode sejarah. Metode Penelitian sejarah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kelembagaan *Schutterij* Makassar, susunan organisasi pengelola batalion, tunjangan personel, perekrutan personel, pembayaran kas kontribusi, dan jumlah anggota *Schutterij*. Prosedur yang harus dilakukan dalam metode Penelitian sejarah meliputi; (1) pemilihan topik, (2) heuristik (pengumpulan

sumber), (3) verifikasi (kritik sumber, kredibilitas sumber), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (4) historiografi (penulisan hasil Penelitian).

Metode penelitian ini diawali dengan menentukan tema penelitian berdasarkan hasil bacaan dan kajian mengenai organisasi kepolisian sebelum kemerdekaan dari hasil bacaan dan kajian tersebut penulis menemukan satu lembaga bentukan pemerintah Hindia Belanda yang turut andil dalam mengawal keamanan dan ketertiban. Lembaga tersebut bernama *Schutterij*. Dari proses tersebut penulis mengajukan judul dengan tema “Pelaksanaan Keamanan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Makassar ”. Pada tahap berikutnya, penulis melakukan pengumpulan data (heuristik), baik data primer maupun sekunder. Pada tahap ini dikumpulkan sumber utama dari kantor Arsip, baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta maupun dokumen dari Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber primer yang digunakan penulis adalah sumber kolonial yaitu *Kolonial Verslag*, *Staatsblad* dan *Regering Almanak* yang penulis peroleh dari Drs. Dias Pradadimara M.A. selaku dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Data primer tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber sekunder, seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul penulis. Sumber sekunder ini diakses dari berbagai situs internet, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Unhas serta situs-situs jurnal lain seperti Jurnal Lensa Budaya, Jurnal Citra Lekha dan situs lain yang memuat jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian. Pada tahap ketiga, setelah sumber primer dan sekunder dikumpulkan maka dilakukan kritik sumber. Kritik sumber berfungsi untuk mengetahui data mana yang sesuai dengan judul

yang telah ditentukan oleh penulis kemudian memilih sumber yang paling relevan untuk digunakan. Tahap ini disebut Verifikasi sumber. Adapun aspek yang dikritik pada tahap ini adalah mengenai keaslian sumber dan tingkat kebenaran informasi. Pada tahap berikutnya yaitu Interpretasi, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap informasi yang telah diperoleh berdasarkan sudut pandang ilmiah. Sudut pandang ini dibuat se-objektif mungkin, melalui sumber yang relevan. Tahap kelima yaitu Historiografi, tahap ini merupakan tahap terakhir dengan merangkum semua hasil analisis menjadi sebuah tulisan ilmiah.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan karya tulis. Kajian pustaka dikembangkan melalui telaah secara mendalam pada literatur atau beberapa pustaka yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. Sebagai usaha untuk menghindari kerancuan objek studi dan juga untuk memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka pada beberapa buku yang relevan. Tinjauan pustaka dilakukan penulis untuk bahan referensi dan dasar rujukan dalam menyusun karya tulis ilmiah.

Tinjauan pertama yang penulis gunakan adalah salah satu isi dari terbitan milik *Departement van Binnenlandsch Bestuur* atau Kementrian dalam negeri pemerintah Hindia Belanda dengan judul “*Schutterijen en Andere Korpsen Niet Rechtstreeks tot het Leger Behoorende*” yang memberikan informasi mengenai pembentukan *Schutterij* sebagai satuan yang harus ada di semua kota regional di Hindia Belanda dan berada dibawah wewenang kepala pemerintah daerah. Khusus untuk wilayah Celebes telah ditetapkan bahwa bagi *Schutterij* dalam keadaan

yang sangat mendesak dapat dikerahkan untuk menjaga keamanan dimasing-masing wilayah kepala daerah dan melaporkan kepada *Gouverneur General*. Karya ini juga memberikan gambaran mengenai kenggotaan *Schutterij* yang mewajibkan setiap laki-laki sehat dan merupakan warga kota regional baik itu orang Belanda maupun Pribumi yang telah memasuki usia 18 tahun harus melaporkan diri dan mengikuti pelatihan ini, dan juga pengecualian orang-orang yang harus melakukan pelayanan sebagai *Schutterij*.

Tinjauan selanjutnya yang penulis gunakan mengenai struktur organisasi *Schutterij* dalam tulisan berjudul *De Nederlandsche Schutterij* yang ditulis oleh J. de Lange, diterbitkan oleh Deventer tahun 1831 kemudian diterbitkan kembali oleh dbnl tahun 2010 dalam tulisan ini memuat mengenai struktur dalam satuan *Schutterij* dan bagaimana perbedaan dari masing masing bagian serta tugas dan pengertiannya. Dalam tulisan ini juga dipaparkan gambaran mengenai perbedaan tingkatan dan tugas pengawal dalam bentuk lukisan yang masing masing satuan memiliki seragam berbeda.

Tinjauan selanjutnya yang penulis gunakan mengenai sejarah keamanan di Indonesia yang bertajuk sejarah kepolisian yakni buku dengan judul *Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Kepedulian dan Ketakutan* karya Marieke Bloembergen yang diterbitkan oleh penerbit buku kompas bekerja sama dengan KITLV Jakarta. Buku ini dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk satuan-satuan pengamanan di periode Hindia Belanda yang tidak hanya terdiri dari kepolisian. Dalam buku ini memuat informasi mengenai proses-proses re-organisasi kepolisian dan masalah yang termuat didalamnya. Dibahas juga mengenai bagaimana keamanan kolonial menjadi suatu masalah baru pada tahun 1870 hingga 1897. Juga

membahas mengenai pelayanan jasa keamanan bersenjata di Hindia Belanda, pelayanan jasa keamanan bersenjata baik formal ataupun informal, pelayanan ini dimaksudkan agar pemerintah kolonial tidak hanya dapat meminta bantuan polisi pamong praja dan polisi bumiputera tetapi juga dapat memberdayakan dinas-dinas bersenjata ini. Di Jawa dan Madura juga ditemukan kelompok bersenjata yang beranggotakan warga pribumi. Contoh dari pasukan di atas adalah pasukan tombak (*Piekeniers*) dan serdadu polisi di Batavia, korps *Pradjoerit* dan *Djayang-Sekar* di Jawa dan tiga korps “Barisan” di Madura. Tugas mereka adalah menjaga gudang-gudang pemerintah, kantor pemerintahan dan mengawal transportasi. Khusus “Barisan” memiliki tugas militer sebagai Pasukan cadangan dalam operasi militer. *Djayang-Sekar* dibentuk pada periode pemerintahan Gubernur Jenderal H.W Daendels (1807-1811) yang bekerja sama dengan Pasukan kavaleri bersenjata ringan (*dragonders*) untuk menyelesaikan masalah gangguan keamanan dipedalaman. *Pradjoerit* sendiri merupakan korps bantuan atau cadangan teritorial yang terdiri dari pasukan pribumi, berkuda dan bersenjatakan senapan. Pada tahun 1885 di Jawa dapat ditemukan 54 korps *pradjoerit*.

Tinjauan selanjutnya yakni mengenai kondisi wilayah kota Makassar pada periode yang akan diteliti, menggunakan buku dengan judul *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* Oleh Mukhlis di dalam buku ini terdapat karya berjudul “Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad Ke 19-20” yang ditulis oleh Daud Limbagau, diterbitkan oleh P3MP Universitas Hasanuddin yang memuat tentang sejarah kota Makassar pada periode Hindia Belanda. Dalam tulisan ini banyak menampilkan tentang kondisi Makassar mulai dari penataan wilayah hingga susunan pemerintahan. Salah satu yang ditampakan adalah bahwa pada

awalnya Makassar diatur langsung oleh pemerintah pusat *Gewest Celebes en Ondershoorigeden* di Makassar. Dalam tatanan birokrasi pada masa itu dimana jabatan yang dianggap vital diberikan kepada pegawai berkulit putih, sedangkan bagi pegawai pribumi diberi jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat pribumi. Tatanan ini bertahan hingga tahun 1960an kemudian memasuki tahun 1890 bahkan sampai 1900 kedudukan pribumi dalam struktur birokrasi di Makassar adalah dalam bidang pengamanan dan ketertiban yang pada dasarnya adalah tugas kepolisian. Para elit pribumi diperlukan pengaruhnya dalam mengamankan pelaksanaan pemerintahan dan menyampaikan instruksi dari atas (pemerintah kolonial) yang ditujukan kepada rakyat. Disamping itu tugas keamanan dan ketentaman dibebankan kepada golongan ini agar tercipta kestabilan di tiap-tiap lingkungan masyarakat pribumi.

Tinjauan selanjutnya menggunakan karya dari sejarawan Jepang Takashi Shiraishi yang digunakan penulis untuk membandingkan perjalanan sejarah kepolisian dengan milisi keamanan. Tulisan berjudul *A New Regime Of Order: The Origin Of Modern Surveillance Politics In Indoesia* dalam karya ini memberikan gambaran mengenai bagaimana re-organisasi kepolisian dan bagaimana polisi yang seutuhnya lahir beriringan dengan modernisasi. Sama seperti karya Bloembergen karya ini juga dijadikan sebagai bahan perbandingan mengenai satuan-satuan pengamanan pada pemerintahan Hindia Belanda. Dalam karya ini memaparkan mengenai bagaimana kepolisian modern yang dapat bekerja secara profesional dengan pendirian korps agen polisi. Kekuatan gabungan dari polisi administrasi dan agen polisi bersenjata atau profesional tetap tidak memadai. Pada 1907-1908 jumlah mereka berkisar 9.500 orang, dengan

tugas masing-masing termasuk agen polisi yang bertugas menjaga penjara, mengangkut tahanan, dan kepolisian khusus untuk urusan opium, kopi atau kehutanan. Menurut perhitungan A. Neijzell de Wilde, yang pernah menjadi anggota komisi kesejahteraan melihat situasi polisi saat itu diperlukan lebih dari 4000 agen polisi dan opas untuk 250 desa di Jawa dan Madura.

Tinjauan berikutnya menggunakan buku berjudul *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* yang ditulis oleh Edward L. Poelinggomang memberikan informasi mengenai kondisi kota Makassar sebagai kota pelabuhan pada abad ke-19. Pembahasan yang diangkat mengenai kondisi penduduk kota yang mengalami peningkatan dan penurunan, kondisi pelabuhan dan kesibukan pelabuhan hingga perusahaan-perusahaan dagang yang ada di kota Makassar pada periode abad ke-19. Komposisi penduduk selalu berubah seperti misalnya pada 1893 jumlah penduduk timur lainnya semakin meningkat, dengan komposisi 940 orang Eropa, 169 orang Arab, 30 orang Timur Asing, 2.618 orang Cina, dan 14.169 bumiputera. Berkaitan dengan kebijakan “Pelabuhan Bebas” yang diterapkan di Makassar mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan dagang di Makassar. Beberapa perusahaan baru yang berdiri di Makassar seperti W.L. Mesman dan Muller & co. Pada 1850, Hansen & nio Bun Liang (usaha gabungan antara orang Inggris dan Cina) pada 1855 hingga Lie Ing Guang pada 1860 dan masih banyak lainnya. Pertumbuhan perusahaan dagang ini kemudian mendorong munculnya perusahaan asuransi pelayaran dan perdagangan, pada 1880an misalnya terdapat kira-kira enam perusahaan asuransi yang berdiri pada periode itu.

Tinjauan berikutnya menggunakan jurnal berjudul *Dibentuknya Negara*

Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19 karya Dias Pradadimara dari jurnal Lensa Budaya yang digunakan sebagai tinjauan mengenai kota Makassar. Pada jurnal ini memaparkan mengenai wilayah Sulawesi bagian selatan setelah aturan *Nieuw Orgaizatie* dan perjanjian bongaya yang diperbaharui. Sejak tahun 1850 serangkaian kejadian menciptakan kondisi dimana semakin dipercepatnya pe(mapan)an negara kolonial. Salah satunya, peradilan diatur lebih rinci berdasarkan *Nieuwe Organisatie 1824* dimana dalam ayat 34 dinyatakan bahwa juga dibentuk adanya *Raad van justitie* yang berkedudukan di Makassar, kemudian apa yang disebut *Grooten* atau *Algemeenen Landraad* juga di Makassar, kemudian *Landraden* di “ibukota” (*hoofdplaats*) tiap-tiap wilayah (*afdeeling*), *Magistraat* (untuk Distrik Makassar), dan yang paling bawah adalah Kepala-kepala desa atau kampung (*Dorps of Kampongshoofden*). Di tahun 1863 di Makassar sudah disusun *Raad van justitie* dengan seorang ketua (president), 4 orang anggota, seorang petugas (*officier van justitie*), panitera (*griffier*) dan penggantinya, dan seorang petugas (*deurwaarder*). Untuk peradilan di tingkat bawahnya, ada *Groote landraad* di Makassar yang dikepalai oleh seorang pejabat Belanda beranggotakan pimpinan-pimpinan pribumi seperti Kapitan Melayu, Kapitan Wajo, Galarang Mariso, Galarang Bantaeng, Galarang Kajang, Kepala Jaksa (*hoofddjaks*), imam (*hoofdpriester*) dan seorang sekretaris.

Tinjauan terakhir adalah skripsi berjudul *Corps Schutterij di Surabaya Tahun 1838-1942* Yang ditulis oleh Naval Dwi Prasetyo. Melalui tulisan ini penulis dapat membandingkan keberadaan korps *Schutterij* di Surabaya dan terbentuk sejak satuan ini pertama kali lahir di Hindia Belanda. Dalam skripsi ini memberikan informasi mengenai keorganisasian *Schutterij* di Surabaya dan

bagaimana *Schutterij* mengawal keamanan di Surabaya pada periode tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau kajian historiografi yang relevan, serta sistematika penulisan. Adapun dalam bab I ini dibuat berdasarkan pedoman penulisan dan pelaksanaan tugas akhir yang dibuat oleh Tim Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

BAB II. Perkembangan Struktur Pemerintahan Kota

Makassar di Abad ke XIX

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai letak geografis kota Makassar, demografi kota Makassar, keadaan politik dan pembagian administrasi pada abad ke-19, kantor-kantor Pemerintah Hindia Belanda yang ada di kota Makassar dan kantor pelayanan masyarakat yang di kawal oleh *Schutterijen*. Adapun Sub bab terdiri dari:

2.1 Gambaran Wilayah Kota Makassar

2.2 Kondisi Sosial Penduduk Kota Makassar

2.2.1 Penduduk

2.2.2 Pendidikan

2.3 Struktur Pemerintahan dan Administrasi Kota

Makassar

2.3.1 Bidang Pemerintahan

2.3.2 Bidang Peradilan

- 2.3.3 Urusan Yatim Piatu dan Warisan (*Wees en Budelkamer*)
- 2.3.4 Bidang Lain-Lain (*Varder Plaatselijk Personeel*)
- 2.3.5 Kepala Pemukiman Orang Eropa (*Europesche Wijkmeester*)
- 2.3.6 Kepala/Urusan Penyemprotan (*Brandspuitmeester*)

2.4 Pengelolaan Keamanan Kota Makassar

- a. Pengadilan Tinggi
- b. Pengadilan Negeri

BAB III. Korps *Schutterij* di Hindia Belanda

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai korps *Schutterij* sebagai penyedia layanan keamanan bersenjata non-KNIL di Hindia Belanda dan perbedaan korps *Schutterij* di Hindia Belanda dan di Belanda. Adapun sub bab dalam bab ini adalah:

3.1 Korps *Schutterij* di Belanda

3.2 Korps *Schutterij* di Hindia Belanda

3.2.1 Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Pada Pasukan *Schutterij*

3.2.2 Keanggotaan *Schutterij* di Hindia Belanda

3.3 Satuan Pengamanan Lain di Hindia Belanda

3.3.1 Djayangsekar dan Pradjoeit

3.3.2 Barisan di Madura

3.3.3 Lijfwachten Dragonders

3.3.4 Korps Polisi Besenjata (*Korpsen Gewapende*)

Politiedienaren)

3.3.5 Korps Sukarelawan (*Vrijwillingerkorpsen*)

3.3.6 Legioen van Mangkoe Negoro

BAB IV. Korps *Schutterij* di Makassar

Dalam bab ini berisi sub-bab tentang keorganisasian korps *Schutterij* di Makassar kemudian berisi sub-bab kecil seperti pengelolaan batalion, perekrutan personel, kontribusi, tunjangan gaji, dan jumlah personel & kekuatan. pembubaran satuan *Schutterij* sebagai satuan pengawal dan bagaimana satuan ini ditutup. Adapun sub bab pada bab ini adalah:

4.1 Pengelolaan Satuan Pengawal Kota

4.1.1 Perekrutan Pesonel

4.1.2 Jumlah Personel, Kekuatan (*Formatie, Wapening, Kleeding, Toelagen en Administratie*)

4.1.3 Pembayaran Kontribusi dan Tunjangan Personel

4.2 Personel Pengawal Keamanan Kota Makassar

4.3 Latar Belakang Personel Pasukan Pengawal Kota

BAB V. Penutup

Dalam bab ini akan dibahas mengenai intisari dari penelitian selama peneliti melakukan riset mengenai topik pembahasan peneliti yakni satuan *Schutterij* di Makassar 1875-1917 dan juga beberapa saran untuk penulis dan beberapa pihak yang terlibat.

BAB II

PERKEMBANGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

DI ABAD KE XIX

Kota Makassar sebagai salah satu kota penting di Hindia Belanda memiliki potensi untuk berbagai kajian sejarah. Pertumbuhan dan dinamika kota Makassar di Abad ke-19 merupakan hal yang sangat kompleks sehingga perlu banyak kajian agar dapat menggambarkan kota ini di Abad ke 19. Dalam bab ini akan memberikan gambaran kota Makassar di Abad ke 19 dalam aspek wilayah, penduduk, ekonomi, politik, pendidikan dan keamanan.

2.1 Gambaran Wilayah Kota Makassar

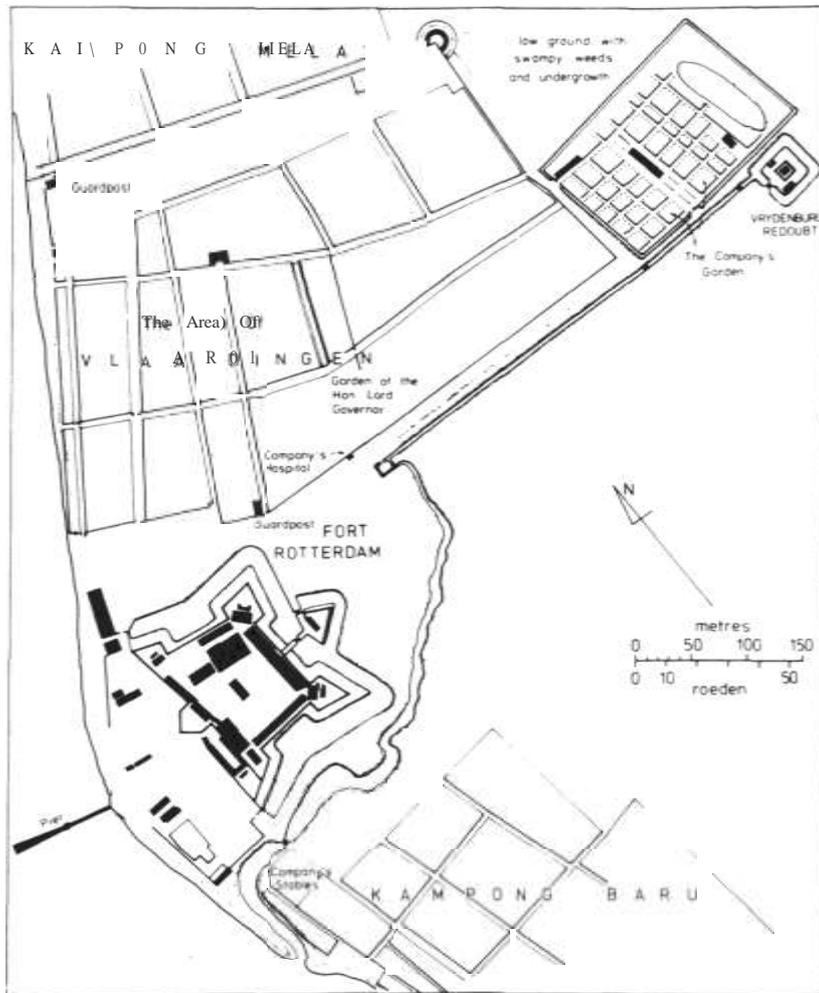
Gambaran mengenai kota Makassar pada periode awal adalah pada sebuah peta yang disebut "*Fort Rotterdam and Environs 17th Century*" yang berada dalam buku klasik Leonard Y. Andaya tentang Aru Palakka. Namun, terdapat kekeliruan dalam peta tersebut yakni penulisan tahun, peta tersebut dibuat oleh Mayor Reimer seorang anggota seni militer, untuk sebuah komite penyidikan atas pertahanan VOC yang dikirim tahun dari Belanda pada tahun 1790. Kesan yang diberikan peta tersebut adalah jalan yang rapi dan tembok yang bagus sangat tidak realistis karena gambaran tembok yang ditunjukkan dalam peta baru dibangun pada tahun 1788.¹³ Sementara keadaan sebenarnya pada periode awal ialah kota Makassar belum memiliki tembok yang memisahkan wilayah justru yang ada ialah wilayah benteng Rotterdam yang menjadi pusat pemerintahan dan kawasan

¹³ Heather Sutherland . "Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Makassar: Perdagangan dan Kota di Abad ke 18", Dalam *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Ombak) Hal. 25.

vital perdagangan berada di *Vlaardingen*.

Kawasan *Vlaardingen* yang terletak disebelah utara benteng *Rotterdam* diperluas dan dibangun beberapa jalan dimana orang-orang Eropa, *mestizo* Eropa-Asia, Cina, *Mardijkers* (bekas budak yang kristen dan keluarganya), Moor¹⁴ dan orang-orang pribumi tinggal. Meskipun sebagian besar tentara Belanda dan para pejabat tinggi tinggal di dalam benteng tetapi ada juga di antara mereka yang tinggal di *Vlaardingen*. *Vlaardingen* secara tradisional dapat dikatakan sebagai pusat perniagaan wilayah “perkotaan” Makassar yang dikuasai Belanda.

¹⁴ Moor adalah sebutan untuk orang muslim dari zaman pertengahan yang tinggal di Al-Andalus (sekarang semenanjung Iberian termasuk Spanyol dan Portugis). Serta Maroko dan Afrika Barat, kata ini juga digunakan di Eropa untuk menunjuk orang yang memiliki keturunan Arab atau Afrika.



Gambar 2.1 Map Fort Rotterdam and Environs, 17th Century.¹⁵

Kemudian setelah jumlah penduduk bertambah di kota ini, kawasan kota hanya dapat diperluas ke timur, di bagian selatan terdapat benteng lain dan lapangan militer di sekitar benteng, sebelah barat adalah laut dan di utara benteng terdapat *Vlaardingen* yang relatif padat hingga wilayah Ujung Tanah. *Vlaardingen* dilindungi oleh *pagers* atau tembok dari batang kelapa dan bambu yang pertama kali didirikan tahun 1765 dan selalu diperbaharui secara teratur sesudahnya. Ketika kota berkembang ke timur benteng kumpulan rumah dari bambu mulai muncul di luar pagar (*pagers*) dan ketika pemukiman bertambah

¹⁵ Sumber : <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbnm4wp.26>

padat, pagar baru mulai didirikan untuk melindunginya akan tetapi rumah-rumah baru muncul lagi di sebelah timur pagar, hal ini terus terjadi berulang-ulang. Jika dilihat dari lokasinya, kota Makassar berada di dekat laut dan terletak jauh dari Benteng Somba Opu dan kampung Mangallekana yang pernah menjadi pusat perniagaan pada zaman kejayaan kesultanan Gowa. Berada di dekat laut atau muara sungai merupakan satu ciri khas dari kota kolonial.

Selanjutnya di awal abad ke-19 merupakan periode yang membingungkan bagi Nusantara karena adanya ketidakpastian kekuasaan.¹⁶ Hal yang sama mungkin juga terjadi di wilayah Sulawesi Bagian Selatan, setidaknya sampai dengan tahun 1824. Pengalihan kekuasaan Hindia Timur dari Belanda oleh Britania pada tahun 1811 dianggap bukan perebutan koloni oleh Britania melainkan cara agar tidak terjadi pengalihan kekuasaan yang tidak sah oleh Prancis dan meletakkannya dibawah perlindungan Britania.¹⁷ Di Makassar sendiri kekuasaan baru diserahkan oleh Gubernur Makassar, Letnan Kolonel Johan Bassar van Wikkerman (1809-1912) kepada Richard Philips selaku residen Makassar (1812-1814) pada 8 Maret 1812.¹⁸ Empat tahun kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda baru memperoleh kekuasaannya kembali setelah adanya serah-terima kekuasaan oleh Residen Makassar, D. M. Dalton (1815-1816) kepada komisararis Belanda Peter Theoderus Chasse (merupakan mantan Gubernur Makassar tahun 1800-1808) pada 7 Oktober 1816.

¹⁶ Seperti yang dikatakan Furnivall dalam bukunya *Nederkands India, A study of Plural Economy*.

¹⁷ Dias Pradadimara. "Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19". *Lensa Budaya* Vol. 12 No. 2, 2017. Hal. 58.

¹⁸ Alief Nur Situdju M.N. "Jaringan Jalan Darat di Sulawesi Bagian Selatan Tahun 1824-1906". Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2019 Hal. 70.

Tahun 1824 dapat dikatakan sebagai tahun yang sibuk karena serangkaian peristiwa penting dan menentukan arah perkembangan sejarah Hindia Belanda pada umumnya dan sejarah Sulawesi Selatan pada khususnya. Pada tanggal 17 Juli 1824 Gubernur Jenderal mengeluarkan satu aturan tata pemerintahan baru di wilayah Makassar yang mengatur aspek administratif maupun peradilan atau *Nieuwe Organisatie 1824*¹⁹ yang diterbitkan dalam *staatsblad* 1824 nomor 31 a. Dimana wilayah Makassar yang dimaksud dalam aturan ini adalah dari titik utara yang sekarang menjadi kota Palu (sebelumnya disebut teluk *Palos*) sampai Pulau Selayar dan Pulau Sumbawa di Selatan dan Pulau Buton di Timur.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda G.A.G.P van der Capellen mengadakan pertemuan dengan raja-raja dari semua kerajaan di Sulawesi, meskipun tidak semua raja hadir dalam pertemuan itu tetapi pertemuan ini menghasilkan sebuah naskah perjanjian perdamaian yang disepakati baik oleh raja-raja yang hadir maupun pihak pemerintah kolonial van der Capellen. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai “perjanjian pembaruan atas Perjanjian Bungaya 1667/1669” (*Bongayas Contract te Oejoeng Pandang Vernieuw*) dan ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1824.

Di tahun 1848 pengaturan administratif dilanjutkan dimana Pemerintahan Makassar diganti namanya menjadi *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden* (Pemerintahan Sulawesi dan Wilayah Taklukannya) yang secara eksplisit menunjukkan wilayah yang diklaim pemerintah Hindia Belanda meski pada prakteknya tidak mengubah wilayah yang dikelolanya. Dengan pengaturan ini, secara lebih rinci lagi pembagian wilayah dibagi menjadi tiga

¹⁹ Op Cit., Dias Pradadimara, “Dibentuknya Negara ... Hal. 61.

kategori yaitu:²⁰

- 1) Wilayah langsung di bawah kekuasaan Hindia Belanda (*Gouvernement Landen*).
- 2) Wilayah yang tidak secara langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda (*Leenroerge Landen*) atau disebut juga daerah pinjaman. Dimaksud wilayah yang tidak diperintah secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda tetapi telah ditundukkan oleh militer pemerintah Kolonial Hindia Belanda disebut juga sebagai “daerah tundukan”. Wilayah ini disebut juga sebagai “daerah pinjaman” karena wilayah yang termasuk kedalamnya telah dianggap sebagai wilayah kekuasaan Hindia Belanda tetapi “dipinjamkan” atau “diserahkan kembali” kepada penguasa tradisional setempat. Wilayah yang dimaksud akan diserahkan kembali kepada penguasa tradisional yang telah mengesahkan kontrak yang Menyatakan bahwa mereka akan mewakili pemerintah kolonial berkuasa di wilayahnya sendiri.
- 3) Kerajaan merdeka yang hubungannya dengan Pemerintah Hindia Belanda didasarkan pada perjanjian Bongaya yang diperbarui tahun 1824 atau daerah-daerah Sekutu (*Bondgenootschappelijke Landen*). Kepada daerah ini pemerintah kolonial hanya menuntut kedaulatan atas pemerintahannya di Sulawesi Bagian Selatan.

Wilayah yang termasuk dalam kategori pertama adalah Distrik Makassar meliputi kota Makassar sendiri, dan pulau-pulau kecil yang terletak di Selat

²⁰ Daud Limbagau, “Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20”, Dalam Mukhlis: *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin) Hal. 20

Makassar atau di sebelah Selatan kota Makassar yaitu:²¹ pulau-pulau Spermode (Kalarowang ri Lau, Kalarowang i Raya, Ba'tangang), Sakulawa, Bana-Banawang, Salemo, Sagara, Sabanka, Tello Lempo, Samatello Tengnga, Samatello Cadi, Rea Roang, Salebo, Towa Raja, Denna Camba, Labuwa, Uwasang, Gusung, Anru Reijang, jangang-janganga, Bone-Boneyang, Batu Luwar, Lantang Gege, Pingo, Korita, Samrangang Sama Tellu ri Lau, Sama Tellu i Raya, Sama Tellu Finge, Saputi Sabuton, Banko-Bankoan, Saugie, Satando, Cambe, Cambaang Kulambeng, Palla, Laiya, Lompo Utang, Karawrang Cadi, Karawarang Lompo, Serappo Lompo, Serappo keke, Podang Lompo, Pankaiya, Kankadiya, Balang Lompo, Balang Cadi, Mouang, Gunting, So Soa, Sanane, Panangbuangang, Pajenekang, Bungeng Data, Badi, Bone Tambung, Bone Battang, Barang Lompo, Barang Cadi, Kodingareng Lompo, Samaloku, Lai-lai, Gusung Bone, Sorante, Pamangangang, Pandangangang, Kapoposang, Lomo hingga Kondo Bali; Distrik Utara (*Noorderdistricten*) yang meliputi wilayah Maros, Mandalle, Bontoa, Tangkuru, Tallaju, Tanralili, Turikale, Simbang, Ri Lau', Ri Timboro', Ri Raya, Sudiang, Malawa, Camba, Caneba, Balocci, Laiya, Labuaja, Bungoro, Pangkajene, Bengo, Labbakkang/Labakkang, Ma'rang, Kalukua, Sigeri/Segeri, Tallo, Payang, Kalebone/Kaba, dan Kate'ne; Distrik Bantaeng dan Bulukumba (*Bonthain en Boeloecoemba*) meliputi Distrik Bantaeng/Bonthain dan Tompobulu, Gantarang, Tala', Ujung Loe, Palewoi, Bontotangnga, Garassi, Hero, Lange-Lange Tiro, Ara, Tana Beru, Lemo-Lemo dan Bira; Distrik bagian selatan (*Zuider Districten*) yang meliputi beberapa

²¹ *Lijst der Landen en Filanden tot Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden*. (Arsip Nasional RI khusus arsip Makassar No. 362/4). Via Daud Limbagau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20", Dalam Mukhlis: *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin)

distrik seperti Distrik Aeng Towa, Bontolebang, Glisson (Galesong), Polongbangkeng, Sawakong, Manuju, Ballo, Lengkese, Takalar, Tope Jawa, dan Lakatong; Distrik-distrik bagian Timur (*Ooster Districten*) serta Distrik Selayar yang meliputi Distrik Bonto Bangun, Tanete, Batang Mata, Bukit, Mare'-Mare', Bonea, Opa-Opa, Gantarang, Balla Bulu, Laiyolo, bonto Barusu', Barang-Barang, Puta Bangunn dan Onto.

Wilayah yang termasuk kategori kedua ialah Kajeli, Pare-Pare, Ternate, Tello, Wajo, dan Laiwoei. Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori ketiga ialah Mandar, Toraja, Massengrempulu, Luwu, Ajatappareng²², Bajokeke, Batu Putie²³, Labaso, Barru, Soppeng, Bone, Gowa, Sanrobone, Toratea, Buton, Sumbawa dan Flores.

Dengan terbentuknya *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden* maka ditunjuklah Makassar sebagai pusat pemerintahan untuk wilayah Sulawesi dan daerah taklukannya. *Gouvernement van Makassar* tetap dipimpin oleh seorang Gubernur, dan setiap distrik dikelola oleh seorang *magistraat* (Untuk Distrik Makassar) dan *resident* untuk distrik lainnya yang didampingi oleh para *regent* (penguasa setempat) dan dibantu oleh kepala kepala distrik (*districthoofd*) *gallarang* dan *jannang* {Makassar} atau *galla* dan *janna* {Bugis}.

Penataan berikutnya adalah *distrik* Makassar sudah terdapat beberapa kampung di dalamnya yakni *Vlaardingen*, *Prins Henrik Pad* dan Kampung Baru meskipun sebenarnya kampung-kampung tersebut sudah ada sebelumnya. Tahun

²² Ajatappareng adalah sebuah kawasan di bagian barat Sulawesi Selatan yang meliputi wilayah historis dari persekutuan lima kerajaan kecil: Sidenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta.

²³ Berada di wilayah Mellawa Kabupaten Maros.

1860 *distrik* Makassar di perluas daerahnya dengan memasukan beberapa kampung kedalamnya yakni, Kampung Wajo, Ende, Bissie, Sambung Jawa, Ujung Tanah, Kampung Melayu, Gusung, Gilisong, dan Mariso.²⁴

2.2 Kondisi Sosial Penduduk Kota Makassar

Sejak awal permukiman kota Makassar tahun 1660-an, selain Fort Rotterdam di kota ini juga terdapat *Vlaardingen* (*Koningsplein*, terbentang ke arah Timur setelah pertokoan dan *Compagnies Tuin* “kebun kompeni”). Pusat *Vlaardingen* adalah *Chinnessestraat* (kemudian menjadi *Tempelstraat* dan sekarang menjadi Jalan Sulawesi) mengikuti garis pantai. Hampir semua orang Cina dan cukup banyak orang Eropa tinggal di wilayah ini²⁵. Di sebelahnya ada *Tuinstraat* (jalan kebun) yang kebanyakan dihuni oleh orang Eropa, sebagian besar gedung bata di *Vlaardingen* dapat ditemukan di tempat ini, dengan beberapa gubuk bambu untuk tempat tinggal budak dan para pengikut. Kampung-kampung seperti kampung Melayu, kampung Wajo, dan permukiman Bugis tidak dianggap sebagai bagian dari *Negory Vlaardingen*. Penduduk *Vlaardingen* awalnya muncul dengan cepat tetapi kemudian tetap kecil dan stabil sampai sekitar pertengahan abad ke-19.

Pada pertengahan abad ke-18 *Chinnessestraat* merupakan jalan yang paling penting, baik untuk permukiman maupun untuk perdagangan. Di jalan ini terdapat sekitar 70 rumah, 60% milik orang Cina dan 35% milik orang Eropa. Hingga tembok baru selesai dibangun pada tahun 1788 yang berada disepanjang apa yang

²⁴ Op Cit., Daud Limbagau, “Perjalanan Sejarah Kota Maritim... Hal. 22

²⁵ Op Cit., Heather Sutherland. "Kontinuitas dan Perubahan... Hal. 27

sekarang disebut Jalan Timor disebelah selatan dan Jalan Irian di sebelah timur. Jalan Timor pertama kali dikenal oleh Belanda pada abad ke-19 sebagai *Buitenmuurstraat* karena berada diluar tembok.

Sebelum tahun 1850 pusat perdagangan adalah deretan toko dan gudang yang terbentang dari utara ke selatan, yang dipisahkan oleh dua jalan yakni *Pasarstraat* (sekarang jalan Nusantara) dan *Chinastraat*.²⁶ *Pasarstraat* tidak kalah sibuk dengan *Chinastraat* terlebih pada awal abad ke-20 di sana ada tiga toko pakaian besar yakni, Hotchand Kemchand, Bombay Moerah, dan Liberty.²⁷ Setelah pedagang dan pengusaha membangun toko dan perusahaan di Marosstraat (Jalan Maros) sampai ke Kebun Kompeni kegiatan perdagangan semakin menunjukkan dinamis. *Marosstraat* merupakan akses utama antara kota dan daerah pedalaman, baik dari arah utara (seperti Maros), arah timur (Gowa), maupun arah selatan (Takalar). Meskipun demikian daerah tersibuk tetap berada di pusat pertokoan.

²⁶ Edward L Poelinggomang, "Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim", (Jakarta: *Kepustakaan Populer Gramedia*) Hal. 147.

²⁷ Dias Pradadimara, "Penduduk Kota, Warga Kota, Sejarah Kota : Kisah Makassar", Dalam *Kota lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. pp 252-72. (Yogyakarta: Ombak).



Gambar 2.2 :

Aktivitas Penduduk Kota di Pinggir Pantai sekitar tahun 1910 (*Source:* KITLV)

2.2.1 Penduduk

Seiring dengan kegiatan perdagangan yang semakin dinamis mulai melahirkan urbanisasi. Misalnya, penduduk *Afdeeling* Makassar yang terdiri dari Makassar, Tallo, dan pulau pulau disekitarnya. Pada tahun 1847 terdapat sekitar 24.000 jiwa kemudian meningkat pada tahun 1852 menjadi 33.512 jiwa yang terdiri dari 740 orang Eropa, 1.918 orang Cina dan 30.857 Bumi Putera dan Timur Asing. Kemudian di tahun 1856 jumlah penduduk di perkirakan sebanyak 34.940 jiwa²⁸ yang terdiri atas 336 orang Eropa, 1.805 orang Cina, 39 orang Arab, dan 32.424 Pribumi. Peningkatan jumlah penduduk ini diperkirakan karena adanya pekerjaan yang tersedia dan upah yang layak, perluasan wilayah administrasi pemerintah juga akan membutuhkan banyak tenaga.

Di tahun 1860 jumlah penduduk mencapai 42.098 yang dengan rincian, 714 orang Eropa, 3.002 orang Cina, 10 orang Arab, serta 38.372 Bumiputra.

²⁸ Op Cit.,. Daud Limbagau, Hal. 41

Selanjutnya di tahun 1861 jumlah penduduk *Afdeeling* Makassar adalah 43.717 jiwa sementara penduduk kota adalah 22.285 jiwa, rinciannya 795 orang Eropa, 3.935 orang Cina, tujuh orang Arab, dan 17.548 penduduk Pribumi. Kemudian tahun 1864 jumlah penduduk sekitar 41.341 jiwa dengan rincian, 712 orang Eropa, 3.780 orang Cina, 12 orang Arab, dan 37.827 orang Bumiputra.

Menurut laporan mengenai Makassar mulai tahun 1860 hingga tahun 1864 melaporkan beberapa faktor yang mempengaruhi bertambah dan berkurangnya penduduk. Faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk yakni: kesalahan data sebelumnya, tersedianya lapangan kerja, perluasan kebutuhan administrasi pemerintah, dan adanya jaminan sosial dan keamanan. Untuk faktor yang menyebabkan berkurangnya penduduk yakni: adanya hambatan administrasi untuk mengembangkan usaha, adanya ancaman keamanan, kesempatan usaha yang lebih baik di tempat lain, mutasi pegawai pemerintah, dan adanya wabah penyakit.

Sementara di tahun 1870 jumlah penduduk di *Afdeeling* Makassar mengalami kenaikan sebanyak 2.070 jiwa, pertambahan jumlah penduduk ini diakibatkan oleh sensus penduduk di tahun sebelumnya yang kurang tepat. Sementara data dalam arsip kolonial mengenai jumlah penduduk di wilayah pemerintahan langsung antara tahun 1873-1876 tercatat bahwa ditahun 1873 jumlah penduduk berada di angka 355.942 jiwa, 1874 berjumlah 357.528 jiwa, di tahun 1875 terdiri atas 355.162 jiwa, lalu pada tahun 1876 berjumlah 357.473 jiwa.

Jumlah penduduk di semenanjung selatan Sulawesi di akhir abad ke-19 menurut laporan Staden ten Brink berada di angka 1.000.000 jiwa. Pada tahun

1884 jumlah penduduk di *Afdeeling* Makassar sendiri adalah 45.500 jiwa, tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk di pertengahan abad ke-19.

Jumlah penduduk di kota Makassar pada tahun 1888 meningkat pesat hingga menyebabkan pemerintah harus mengembangkan kota. Kota Makassar yang berpusat di Fort Rotterdam perluasannya ke utara sampai ke kampung Paotere dan ke selatan hingga kampung Mangkura, beberapa kampung juga mulai lahir seperti kampung Buton yang ditinggali oleh orang Buton dan kampung Maluku milik orang Maluku²⁹. Komposisi penduduk selalu berubah baik itu jumlah maupun suku. Seperti di tahun 1893 jumlah penduduk kota adalah 17.476 jiwa yang terdiri dari 940 orang Eropa, 169 orang Arab, 30 orang Timur Asing lainnya, 2.618 orang Cina dan 14.169 Bumiputra. Kemudian pada tahun 1916 jumlah penduduk kota Makassar adalah sekitar 39.000 jiwa yang terdiri dari 1.500 orang Eropa, 6.900 orang Cina, 300 Timur Jauh, dan 30.300 Bumiputra. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Timur Asing lainnya meningkat, jumlah penduduk Bumiputra dan Cina berkurang setelah kegiatan niaga mereka dipindahkan ke daerah produksi.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan perubahan jumlah penduduk mulai tahun 1847-1861 menunjukkan adanya pertumbuhan yang terus naik. Sementara itu pada tahun 1861-1864 menunjukkan penurunan jumlah penduduk meskipun tidak signifikan. Data tahun 1847-1864 merupakan data jumlah penduduk *Afdeeling* Makassar yang di dalamnya terdapat *distrik* Makassar yang merupakan kota pusat pemerintahan. Sementara data yang tahun 1893-1916 merupakan data jumlah penduduk *distrik* Makassar atau penduduk kota. Dari

²⁹ Op Cit., Edward L Poelinggomang, Hal.148

semua data dapat dilihat bahwa wilayah kota merupakan wilayah yang terus tumbuh baik wilayah maupun penduduknya.

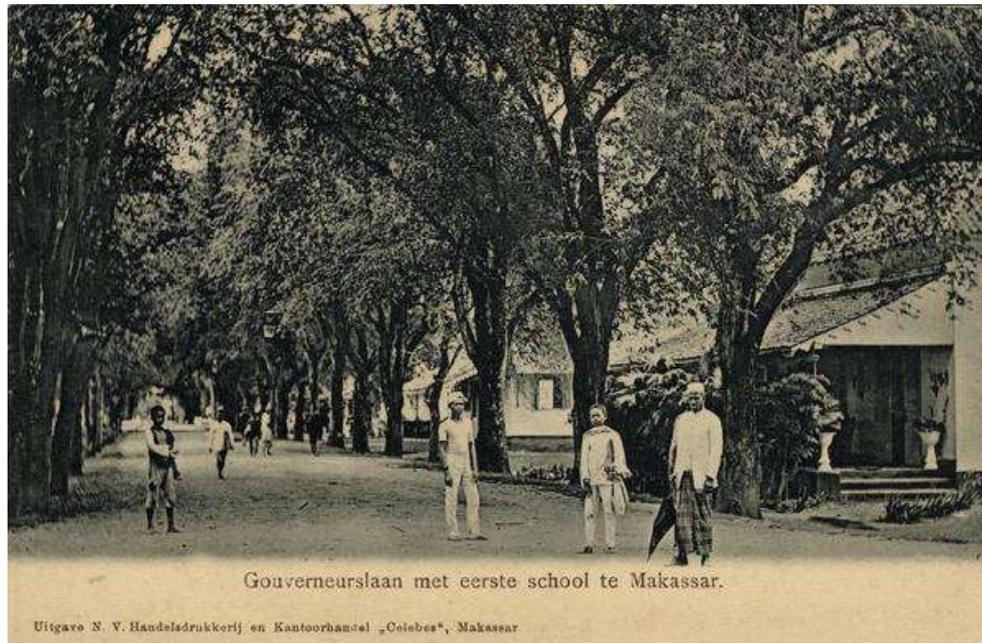
2.2.2 Pendidikan

Selain masalah penduduk bidang pendidikan juga merupakan salah satu hal penting yang akan dibicarakan meskipun pemerintah baru memperhatikan bidang pendidikan pada tahun 1869 berdasarkan surat keputusan Direktur Dinas Pengajaran dan Kerajinan (*Directuur van Onderwijs Eredienst en Nijverheid*) tanggal 13 Juli 1869 No. 5636 mengenai bantuan Sekolah Dasar kelas dua di Makassar. Akan tetapi tenaga pengajar yang menjadi guru di sekolah dasar yang ada di Makassar telah di lantik di tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya di tahun 1861 guru untuk sekolah dasar Tingkat Satu adalah J. C. Tamson kemudian di tahun 1864 diangkat guru lain yakni A. C. Kramer. Untuk Sekolah Dasar tingkat tiga di tahun 1862 diangkat seorang guru yakni J. A. A. van Zolingen, di tahun 1864 terdapat tiga guru baru yakni W. van der Lee, A. A. J. Niels dan K. F. Bax. Setahun kemudian diangkat guru baru yakni H. L. Pieters.³⁰

Pada tahun 1869 terdapat dua sekolah yaitu Sekolah Dasar kelas dua dan kelas satu dengan jumlah murid 132 orang. Berdasarkan keputusan itu diangkat seorang tenaga pengajar yakni G. T. Seeman, kemudian pada 13 Agustus 1869 di tunjuk kembali seorang guru yakni P. van Mill untuk mengajar di Sekolah Rendah kelas dua di Makassar. Untuk wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 1882 terdapat 11 sekolah negeri dengan jumlah murid 324 orang dan di tahun 1883 jumlah murid mencapai 345 orang. Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan menjadi wilayah dengan jumlah sekolah dan jumlah murid lebih banyak dibandingkan

³⁰ *Regering Alamank voor Nederlandsch Indie* tahun 1866. Hal. 408.

wilayah di luar Makassar.



Gambar 2.3

Lingkungan Kantor Gubernur dan Sekolah Tingkat Pertama Makassar
(Source: KITLV Leiden)

Di tahun 1876 B. F. Mattes telah membuka *Kweekschool* dengan tujuan untuk mencetak guru (Mukhlis Paeni: 1985). Kemudian di tahun 1904 di *distrik* Ujung Tanah didirikan sebuah sekolah dasar yang di buka untuk umum juga di bagian selatan benteng (sekarang Karebosi) tetapi di tahun 1905 namanya berubah menjadi Sekolah Pribumi (*Inlandsche School*). Sementara itu bagi orang Ambon yang berdomisili di Makassar tahun 1906-1907 membangun sekolah yang bernama *Holland Ambonsche School* (HAS). Di tahun yang sama pemerintah juga menyetujui pendirian sekolah khusus untuk orang Cina bernama *Holland Chineze School* (HCS). Lama studi untuk HAS dan HCS adalah tujuh tahun sedangkan untuk sekolah pribumi waktu studi lebih singkat yakni lima tahun. Bahasa pengantar yang dalam HAS dan HCS adalah bahasa Belanda sedangkan sekolah pribumi menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa pendidikan bukan hal yang terlalu mendapat perhatian pemerintah kolonial terlebih untuk pendidikan kaum Bumiputra. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan sekolah untuk Bumiputra baru di bangun pada paruh keempat abad ke-19. Maka dari itu data yang diperoleh mengenai pendidikan Bumiputra pada periode ini masih sedikit, terkecuali pada awal abad ke 20 setelah adanya politik etis banyak sekolah untuk Bumiputra yang mulai dibangun.

Selain dua hal diatas, aspek lain yang dapat di lihat mengenai kondisi sosial penduduk adalah mengenai kesehatan. Aspek kesehatan yang hingga tahun 1869 belum mendapat perhatian, terbukti dari jumlah rumah sakit yang terdapat di Makassar hanya ada satu yaitu rumah sakit militer. Rumah sakit inilah yang menampung semua pasien agar memperoleh perawatan. Pasien dengan kondisi kelainan jiwa dan penyakit berbahaya biasanya dikirim ke Jawa, hal ini terjadi karena fasilitas yang diperlukan untuk penyakit tertentu tidak tersedia di rumah sakit di Makassar. Penyakit yang paling banyak diderita penduduk sampai dengan tahun 1869 dan tahun-tahun setelahnya adalah penyakit disentri dan cacar.

2.3 Struktur Pemerintahan di Kota Makassar di Abad ke XIX

Dalam *Regeringreglement* (RR) tahun 1854 pembagian wilayah Hindia Belanda secara administratif dibagi dalam *gewest-gewest* yang ditetapkan oleh kerajaan Nederland³¹. Wilayah-wilayah tersebut digolongkan oleh banyak penulis menjadi dua yakni “Wilayah Jawa dan Madura” dan “Wilayah Luar Jawa” atau *buitenbezittingen* meskipun istilah ini tidak terdapat dalam RR tahun 1854. Pelaksanaan *Regeringreglement* (RR) tahun 1854 di Sulawesi baru terlihat pada

³¹ Op Cit., Daud Limbagau, Hal. 25

tahun 1856 bersamaan dengan diangkatnya C.A. Brauw sebagai Gubernur. Pada periode ini *distrik* Makassar hanya meliputi daerah *Vlaardingen*, Prinds Hendrik Pad, dan Kampung Baru, akan tetapi kampung seperti Kampung Wajo, Melayu, dan Ende sudah berada dalam pengawasan langsung. Meskipun demikian Makassar sudah dapat dianggap satu wilayah yang sama dengan *Afdeling* yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Jabatan Asisten Residen *distrik* Makassar termasuk di dalam biro personalia pemerintahan Sulawesi dipegang langsung oleh *Gouvernement Gubernur* (Termuat dalam *Regering Almanak* tahun 1856).

Struktur Birokrasi lembaga-lembaga pemerintahan *gewest* Sulawesi di Makassar adalah sebagai berikut³²:

2.2.1 Bidang Pemerintahan

- Gubernur : C. A. Brauw
- Assisten Residen : Grudelbach
- Sekretaris Merangkap Perpajakan : A. Y. van der Ven
- Sekretaris Urusan Pribumi : Y. G. Wijamalen
- Pembantu Sekretaris : C. W. Bethbeder
- Pembantu Urusan Pribumi : I. Altheer
- Pembantu Urusan Pemerintahan : C. G. Pieloor
- Penerjemah : J. W. D. Ramberge
& L. Pieters
- Kepala Urusan Agama : Abdul Gafur
- Urusan Ulama : Brahman
- Kapten Melayu : Abdul Husin
- Letnan Melayu : Tajuddin

³² *Almanak Naamregister, Voor Nederlandsch Indie*. Tahun 1856 p 103-104. Via Daud Limbagau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20", Dalam Mukhlis: *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin).

- Kapten Wajo : Kakana Ratte
- Kapten Ende : Karim Daeng Sitaba
- Kapten Cina : Tjing Siang

2.3.2 Bidang Peradilan

- Hakim Ketua : G. F. H. Henny
- Hakim Anggota : A. J. de Graaf, J. C. Termitelen, & G. Keyligers
- Opsir Peradilan : Th. K. Slingerlen
- Sekretaris Peradilan : W. Fadema
- Sekretaris Luar Biasa : L. A. Misero
- Juru Sita : J. Misero

2.3.3 Urusan Yatim Piatu dan Warisan (*Wees en Budelkamer*)

- Ketua : A. F. van der Ven
- Anggota : A.W. Bethbeder, H. Veunger Kuiper & Gong I Ciu
- Pembukuan : N. D. A. Kervel
- Sekretaris : N. Altheer
- Juru Sita : W. S. Beth & Tan Tjing Pae

2.3.4 Bidang Lain-Lain (*Varder Plaatselijk Personeel*)

- Notaris : D. Bodde
- Kepala Pegadaian/Pelelangan : R. H. de Grave
- Kepala Pelabuhan : D. A. J. B. De Graaf
- Kepala Pergudangan : N. D. A. Kersel
- Urusan Pengairan : B. J. Nijastra
- Kepala Penjara : J. P. A. Misero

2.3.5 Kepala Pemukiman Orang Eropa (*Europesche Wijkmeester*)

- Stad *Vlaardingen* : F. A Corporas
- Prins Hendrik Pad : R. H. de Grave
- Negorij Baru : B. J. Worms
- Kampung Baru : D. J. M. Mesman

2.3.6 Kepala/Urusan Penyemprotan (*Brandspuitmeester*)

- Kepala : J. Grudelbach
- Anggota : M. Muller, H. V. Kuiper, J. A. Hahue & E. B. L. van Rhee

Dari daftar tersebut dapat dilihat bahwa jabatan-jabatan penting lebih banyak diberikan kepada orang-orang Eropa bahkan ada yang memegang dua jabatan sekaligus, sedangkan untuk pegawai Pribumi memegang jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Pribumi sendiri. Sampai tahun 1860 belum terdapat perubahan penting, masyarakat bumi putera di *distrik* Makassar masih dalam pengawasan langsung pemerintah. Akan tetapi dalam periode empat tahun itu dapat dilihat perkembangan sistem birokrasi pemerintah yang ditunjukkan dengan bertambahnya beberapa jabatan penting dalam organisasi pemerintahan, yakni: Urusan Perjalanan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Ketantaraan dan Jabatan Kontrolir untuk Parang Loe³³. Selain itu, untuk bidang peradilan juga mengalami kemajuan yang berarti yang ditandai dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Makassar. Pengadilan Tinggi diketuai oleh J. de Munck Mortier dan anggotanya yang terdiri dari kapiten masing-masing kampung, regen, jaksa, hingga ulama. Pengadilan Negeri ketuanya adalah C. C. Hardenberg dengan anggota dari masing-masing kampung.

³³ Regering Alamanak Tahun 1860 p 128. Via Daud Limbagau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20", Dalam Mukhlis: *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin)



Gambar 2.4 : Kantor Gubernur Celebes (*Source:* KITLV)

Setelah tahun 1860 atau setelah gubernur A. J. F. Jansen dilantik jumlah personel yang dipimpin terdiri dari 84 orang yang terbagi menjadi, 46 orang Pribumi, 35 orang Belanda dan 3 orang Cina. Pada masa gubernur J. A. Bakkers yang diangkat pada 6 juli 1965 mulai mengangkat sejumlah kontrolir mulai dari kontrolir Tingkat Satu sampai dengan tingkat tiga. Selanjutnya pada periode pemerintahan C. C. Troump (Dilantik pada 4 februari 1876) menetapkan dua jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan yaitu jabatan Kapten untuk orang Makassar yang di berikan kepada Jawa Daeng Mabali dan jabatan kepala urusan tanah yang dipegang oleh J. R. Abbeg.³⁴

Ketika periode pemerintahan Gubernur A. F. van Braam Morris (dilantik pada 6 januari 1885) struktur organisasi pemerintahan pusat di Makassar dibagi

³⁴ Regering Alamanak Tahun 1880 p 249. Via Daud Limbagau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20", Dalam Mukhlis: *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin)

menjadi beberapa bidang yaitu: Bidang Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepolisian, Kepala Lingkungan/Kampung, dan Bidang Perkuburan. Sementara itu *afdeling* Makassar masih tetap dipimpin oleh seorang kontrolir yakni T. E. K. Th. Kroasen. Pada masa ini wilayah Makassar tetap diatur oleh dua organisasi yaitu organisasi yang langsung di bawah gubernur dan organisasi yang dipimpin oleh Kontrolir. Di bawah Kontrolir adalah para *gallarang* yang ditunjuk sebagai penguasa langsung di wilayahnya masing-masing.

Hingga memasuki tahun 1890 bahkan sampai tahun 1900 kedudukan Pribumi dalam struktur birokrasi kolonial pada dasarnya adalah tugas yang mirip seperti kepolisian. Pengaruh golongan elit pribumi diperlukan untuk mengamankan pelaksanaan perintah/instruksi dari pemerintah kolonial kepada rakyat pribumi.

2.4 Pengelolaan Keamanan Kota Makassar

Aktivitas di perkotaan yang padat memerlukan banyak fasilitas agar dapat mendukung segala kegiatan perkotaan. Selain prasarana berupa pasar, pelabuhan, benteng, jalan dan lainnya, dapat menciptakan rasa aman saat melakukan aktivitas di perkotaan juga penting bagi terlaksananya kegiatan di wilayah kota. Karenanya, pemerintah kolonial membentuk beberapa satuan yang dapat mengawal keamanan kota, selain itu pemerintah juga memilih satu orang dari masing-masing ertnis yang kerkedudukan di kota Makassar sebagai kepala kampung mereka. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat mengawasi langsung warganya dan melaporkan kepada pemerintah kolonial. Seperti pada tahun 1882 Letnan Cina di Makassar di pegang oleh Thoen Tiam dan Gio Eang.³⁵

³⁵ Javabode tanggal 3 oktober 1882.

Selain tentara pemerintah kolonial Hindia Belanda juga memiliki beberapa pasukan bersenjata lain yang dalam waktu normal atau sedang tidak terjadi perang benar-benar terpisah dengan tentara dan berada dibawah otoritas Kepala Daerah. Meski demikian pasukan bersenjata ini tetap dilatih oleh seorang Komandan.³⁶ Maka dari itu keberadaan pasukan yang dapat mengatasi kekacauan di wilayah kota sangat penting keberadaanya bagi pemerintah kolonial.

Sumbangan Raffles dalam mengelolah keamanan di Hindia Belanda, Raffles membuat aturan bahwa masing-masing kepala desa bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan menangkap penjahat.³⁷ Penataan sistem keamanan di kota Makassar tidak lepas dari penataan sistem peradilan yang ditetapkan di Hindia Belanda. Lebih jauh lagi peraturan mengenai peradilan yang terdapat dalam *Staatsblad* tahun 1819 No. 20 ini yang di dalamnya berisi *Besluit van Commissariessen Generaal van Nederlandsch Indie van 10 Januarij 1819*, No. 8. Dalam keputusan ini peradilan dilakukan secara bertingkat, dimana dibuat *districts gegeren* (peradilan yang dipimpin oleh seorang kepala distrik), *regentschapraden* (peradilan yang dipimpin oleh *regent* atau bupati), *landraden* (peradilan yang dipimpin oleh residen atau asisten residen), dan *omnigangende rechtbanken* (Pengadilan Keliling).³⁸

Di Makassar dibentuk *Raad van Justitie* yang diatur berdasarkan *Nieuwe Organisatie 1824* dalam ayat 34. Di tahun 1863 di Makassar disusun *Raad van*

³⁶ “Schutterijen” Dalam: Regering Almanak Voor Nederlandsch Indie tahun 1866

³⁷ Takashi Shiraishi. “A New Regime Of Order: The Origin of Modern Surveillance Politics in Indonesia”, Dalam *Southeast Asia over Three Generation: Essay Presented to Benedict R. O’G Anderson* (Ithaca, New York: Southeast Asia Program Publication Southeast Asia Program Cornell University, 2003) Hal. 49.

³⁸ Op Cit., Dias Pradadimara, *Di bentuknya Negara...* Hal. 67.

justitie dengan seorang Ketua (*President*), 4 orang anggota, seorang petugas (*officier van justitie*), Panitera (*Griffier*) dan penggantinya, dan seorang petugas (*deurwaarder*). Untuk peradilan di tingkat bawahnya, ada *Groote landraad* di Makassar yang di kepalai oleh seorang pejabat Belanda beranggotakan pimpinan-pimpinan pribumi seperti Kapitan Melayu, Kapitan Wajo, Galarang Mariso, Galarang Bantaeng, Galarang Kajang, Kepala Jaksa (*hoofddjaksa*), imam (*hoofdpriester*) dan seorang sekretaris.³⁹

Bidang pertahanan dan keamanan kota Makassar pada pertengahan tahun 1868 dalam kesatuan militer di dukung empat Jaksa Agung, dua genderang/tambur dan 41 pucuk senapan. Hingga pada pertengahan tahun 1869 di dukung oleh empat Jaksa Agung, dua genderang/tambur dan 72 pucuk senapan. Hingga akhir tahun 1869 perwira militer yang berada di Makassar antara lain: Kapten Komandan C. J. van Waesberge, Letnan satu J. Bensbach, Letnan dua Ajudan P. van Hartrop dan sekretaris pengadilan militer Letnan dua J. Wetter. Aspek militer hanya memperlihatkan kekuatan yang bersifat mengawal pelaksanaan pemerintahan. Sistem peradilan di wilayah Sulawesi bagian selatan tertata dengan baik di tahun 1882 setelah dikeluarkannya peraturan yakni *Reglement op het regtswezen in het gewest Celebes en Onderhoorigheden* yang diterbitkan dalam *Staatsblad* 1882 No. 22. Aturan ini sangat rinci karena terdiri dari 553 ayat yang mengatur semua aspek peradilan yang dasar-dasarnya.⁴⁰

Di tahun 1870 di bentuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di

³⁹ *Regerings Almanak* tahun 1863 via Dias Pradadimara. "Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19". *Lensa Budaya* Vol. 12 No. 2, 2017.

⁴⁰ Op Cit., Dias Pradadimara, Hal. 68

Makassar yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan anggota yang berasal dari kaum Bumiputra. Adapun daftar ketua dan anggotanya adalah sebagai berikut.⁴¹

a) Pengadilan Tinggi

1	Ketua	J. de Munck Mortier
2	Anggota	Abdul Husein
3	Anggota	Ladolo
4	Anggota	Usin Dg Sitaba
5	Anggota	Baso Dg Asia
6	Anggota	Nain
7	Anggota	Subu
8	Anggota	Wangun Pua Sikaru
9	Anggota	Ibrahim
10	Anggota	Patahula Dg Matajang
11	Anggota	Lewengang Dg Masampa
12	Anggota	Lape Dg Massikki
13	Anggota	Taji Dg Matarang
14	Anggota	Mamu Dg Maliera
15	Anggota	Hanapi Dg Paraga
16	Anggota	Akasa Dg masarro
17	Anggota	Dg Basumu
18	Anggota	Daeng Pasau
19	Anggota	Sanusi Dg Patalle
20	Anggota	Daeng Gassing
21	Anggota	Abdul Rahman
22	Anggota	Said Muhammad Bahrn
23	Anggota	N Altheer

Tabel 1.1: Keanggotaan Pengadilan Tinggi di Makassar

⁴¹ Regering Almanak Tahun 1870 via Daud Limbagau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20", Dalam Mukhlis: *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin).

b) Pengadilan Negeri

Dalam Pengadilan Negeri di Makassar diketuai oleh orang Eropa tetapi anggota dalam pengadilan negeri terdiri atas orang-orang Pribumi. Seperti dapat dilihat dalam struktur keanggotaan pengadilan negeri di Makassar pada tahun 1870 berikut.

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	C. C. Hardenberg
2	Anggota	Abdul Husen
3	Anggota	Ladolo
4	Anggota	Usin Dg Sitaba
5	Anggota	Tajuddin
6	Anggota	Nain
7	Anggota	Subu
8	Anggota	Wangun Pua Sikanru
9	Anggota	Borahim
10	Anggota	Bundu
11	Anggota	Baso Maka Dg Makkulle
12	Anggota	Jappara
13	Anggota	Jawa Dg Mabali
14	Anggota	Caco
15	Anggota	Unusu
16	Anggota	Guru Jaka
17	Anggota	Said Muhammad Bahrun
18	Anggota	L. A. Misero
19	Anggota	E. L. R.,

Tabel 1.2: Keanggotaan Pengadilan Negeri di Makassar.⁴²

Urusan keamanan di Makassar sebagian besar diberikan kepada masyarakat Pribumi. Masyarakat Pribumi yang melaksanakan tugas kepolisian dan melaporkan ke pihak atasan secara rutin dan teratur kepada kepala kampung melalui *regen* masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan tentara hanya melakukan tugas yang bersifat politik dan tidak langsung berhadapan dengan

⁴² *Regering Almanak. Voor Nederlansch Indie 1870.*

rakyat. Selain itu, tentara dipersiapkan menangani perang penaklukan dan pendudukan daerah-daerah yang direbut dari kekuasaan tradisional.



Gambar 2.5 :

Inheemse Bestuurders en Bestuursambtenaren, Vermoedelijk te Makassar
“Pengawai Negeri dan Pengurus Adat –mungkin di Makassar-“ (Sumber:
KITLV Leiden diakses pada 14 Oktober 2020)

Mengenai keamanan lingkungan yang dihuni oleh kebanyakan orang Eropa, selain angkatan bersenjata, terdapat suatu korps yang ditugaskan menjadi pengawal kota. Pengawal kota ini terdapat di kantor-kantor pemerintah dan gudang milik pemerintah. Pengawal kota di beberapa kota regional memiliki formasi yang berbeda di setiap kota. Mengenai satuan pengawal kota ini akan dibahas pada bab berikutnya. Tugas satuan pengawal kota dapat dikatakan tidak mengalami hambatan karena keamanan kota Makassar dapat dikatakan cenderung kondusif dan tidak terlalu mengalami gangguan. Sebaliknya wilayah luar kota cenderung tidak aman karena terjadi beberapa kekacauan dan tindakan kriminal,

seperti pembunuhan, penculikan ternak dan gadis belia di malam hari, dan berbagai kejahatan yang hampir terjadi di semua wilayah Sulawesi bagian selatan.